

Kegagalan Pemerintah Moon Jae In dalam Mengatasi Penurunan Angka Kelahiran

Faradha Aulia Faza Fachna¹, Frisca Alexandra Ps.²

Universitas Mulawarman

faradhafaza@gmail.com¹, frisca.alexandra@fisip.unmul.ac.id²

Abstract

The declining birth rate in South Korea has become a crucial issue affecting the country's demographic balance since the early 2000s. This study analyzes the failure of birth rate policies during President Moon Jae In's administration using Ted Hopf's constructivism approach, which emphasizes the role of identity, norms, and social constructions in shaping public policies. the result show that despite the implementation of policies such as financial assistance and the recognition of non-traditional families, their effectiveness remains limited. the dominance of social norms emphasizing the importance of marriage before having children, along with changing social values that encourage younger generations to delay marriage, are key factors hindering policy success. therefore, more responsive policies that adapt to social dan cultural shifts are needed to address the declining birth rate more effectively. This study contributes to understanding the relationship between social norms, cultural identity, and social constructions in public policy formulation in South Korea. it also provides insights for policymakers in addressing demographic challenges in the future.

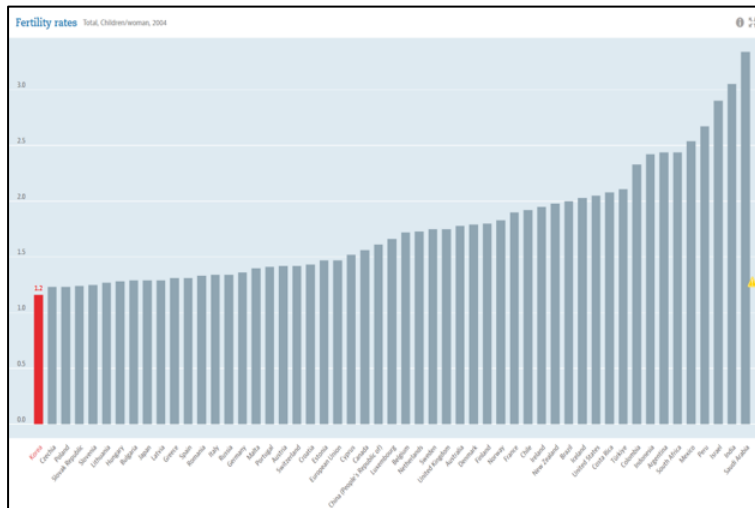
Keywords : birth rate, public policy, constructivism, social norms, South Korea

PENDAHULUAN

Penurunan angka kelahiran merupakan fenomena yang sedang dialami secara global, khususnya pada negara-negara Asia dan Eropa. Pada negara maju faktor ekonomi banyak mempengaruhi fenomena ini. Seperti meningkatnya biaya hidup, meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan perubahan norma-norma pada masyarakat (Maynard, 2022).

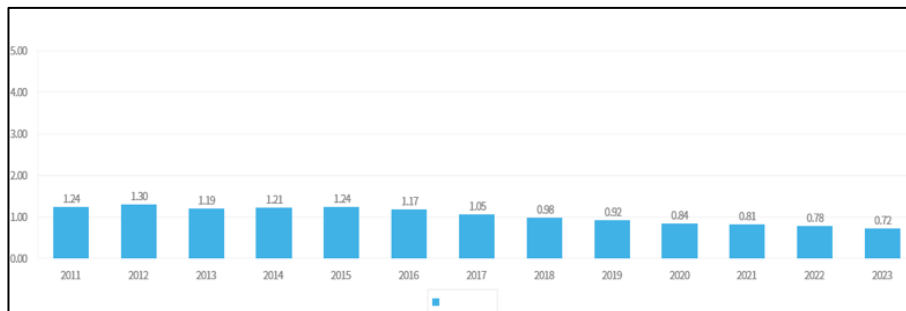
Fenomena penurunan angka kelahiran menjadi sangat penting karena memiliki dampak yang cukup luas terhadap aspek kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah penuaan populasi dimana hal ini dapat membebani sistem perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Kemudian kurangnya masyarakat usia produktif menimbulkan masalah pada keberlanjutan perkembangan ekonomi (IHME, 2024).

Menurut OECD, untuk menjaga populasi suatu negara agar tetap berada dalam status stabil setiap negara harus menjaga *total fertility rate* (TFR) atau tingkat kesuburan tidak kurang dari 2,1 anak per wanita (Yun *et al.*, 2022). Rata rata 2,1 ini dibutuhkan sebuah negara agar dapat mempertahankan berjalannya pergantian populasi (*population replacement*). Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi jumlah populasi lansia dan populasi usia produktif yang nantinya berpengaruh besar pada stabilitas negara. Beberapa negara yang mengalami penurunan angka kelahiran antara lain adalah Korea Selatan, Tiongkok, Spanyol, Italia, dan Jepang.



(Sumber : OECD, 2023)

Grafik diatas merupakan data OECD yang berisi rata-rata kelahiran anak per tahun di tiap negara. Data tersebut menyajikan rata-rata kelahiran anak pada tahun 2004. Data tersebut menunjukkan Korea Selatan memiliki angka kelahiran terendah di dunia pada 2004, yakni 1,2 anak per wanita. Penurunan ini sudah terjadi sejak 1984 (1,7 anak). Dari 2005 hingga 2012, Korea Selatan konsisten berada di dua besar negara dengan angka kelahiran terendah.



(Sumber: Index Korean, 2024a)

Grafik diatas merupakan data resmi pemerintah Korea Selatan yang menunjukkan rata-rata kelahiran pada tahun 2011-2023. Rata-rata kelahiran di tahun 2013 menunjukkan 1,18 dimana hal ini menunjukkan Korea Selatan mengalami penurunan setelah sebelumnya di tahun 2012 rata-rata kelahiran berada pada 1,30.

Fenomena penurunan angka kelahiran di Korea Selatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya hidup semakin tinggi, terutama pendidikan anak dan perumahan membuat banyak pasangan ragu untuk memiliki anak. Beban ekonomi yang dirasakan masyarakat terutama generasi muda kemudian menimbulkan perubahan pada nilai-nilai sosial. Dimana hal ini membuat generasi muda mengutamakan kebebasan pribadi dan kepuasan individu. Perkembangan ekonomi, pergeseran nilai sosial dan budaya membuat generasi muda berpikir dua kali pada pernikahan dan berkeluarga (Cho, 2021).

Beberapa dampak dari rendahnya angka kelahiran sudah dirasakan secara nyata oleh pemerintah Korea Selatan. Seperti, *aging population* atau populasi yang menua. Populasi yang menua terjadi ketika proporsi anak-anak dan remaja menurun sedangkan proporsi lansia dan pensiunan meningkat karena jumlah bayi yang lahir tidak mampu mengimbangi jumlah lansia

yang ada. Pada tahun 2000 proporsi penduduk berusia 65 tahun yang semulanya 7,2% naik menjadi 15,7% pada tahun 2020 (Cho, 2021). Bahkan sebuah penelitian mengatakan pada tahun 2025, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 20% dari total penduduk. Pada tahun 2050, proporsi ini diprediksi akan meningkat menjadi sekitar 44% (IHME, 2024).

Korea Selatan juga sudah dihadapkan dengan masalah kekurangan tenaga kerja, yang kemudian membuat pemerintah Korea Selatan melakukan beberapa program kerjasama dengan beberapa negara di bidang ketenagakerjaan. Situasi kekurangan tenaga kerja sangat mengkhawatirkan karena tenaga kerja dibutuhkan untuk menjaga perekonomian tetap stabil (Mahmoudi, 2017). Namun Korea Selatan juga memiliki budaya patriarki yang kuat di tempat bekerja bagi perempuan sehingga tidak banyak perempuan yang bisa berkontribusi lebih di tempat kerja yang juga menurunkan angka tenaga kerja perempuan (Saragi and Agustina, 2022).

Tidak hanya ekonomi dan sosial, bahkan menurut beberapa ahli fenomena penurunan angka kelahiran ini berdampak pada jumlah peserta wajib militer setiap tahunnya. Dengan terus menurunnya tingkat kelahiran, Korea Selatan harus menerima bahwa jumlah pasukan yang dibutuhkan akan menyusut. Hal ini dikarenakan sistem wajib militer di Korea Selatan karena sistem wajib militer berkaitan erat dengan ukuran populasi (Bae, 2023).

Beberapa sekolah dasar di Korea Selatan bahkan terpaksa ditutup karena tidak memiliki pendaftar, hal ini dikarenakan rendahnya angka kelahiran disana. Sekolah yang masih berjalan dan memiliki pendaftar pun hanya mendapat murid dengan jumlah sedikit. Bahkan ada yang hanya mendapat kurang dari 60 siswa (Jeong-won, 2023).

Pemerintah Korea Selatan sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh menurunnya tingkat kelahiran dan sudah melakukan beberapa upaya demi mengatasi dampak dari fenomena tersebut. Era presiden Roh Moo Hyun (2003-2008) merupakan awal dimana kebijakannya kependudukan untuk mengatasi fenomena penurunan angka kelahiran diberlakukan. Kebijakan fokus pada dukungan keluarga serta pemberian insentif berupa tunjangan keuangan guna membantu masyarakat yang memilih untuk berkeluarga (Jun, 2005). Kebijakan pada era Roh Moo Hyun kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan presiden Lee Myung Bak (2008-2013). Kemudian presiden Park Geun Hye (2013-2017) yang juga masih mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Namun, pemerintah pada masa ini juga menambahkan kebijakan baru yaitu bantuan untuk pencarian pekerjaan dan perumahan untuk pasangan baru (Cho, 2021).

Pada tahun 2017, Moon Jae In menjabat sebagai presiden Korea Selatan. Ia langsung dihadapkan pada fenomena penurunan angka kelahiran negaranya yang terus menerus turun. Untuk mengatasi hal tersebut Moon Jae In merevisi kebijakan yang telah ditetapkan. Presiden Moon merevisi struktur ekonomi dan sosial secara menyeluruh agar lebih inklusif, dimana kepentingan dan kesejahteraan semua generasi menjadi prioritas, bukan semata-mata meningkatkan angka kelahiran (Cho, 2021).

Pada era presiden Moon Jae In pergerakan rata-rata angka kelahiran Korea Selatan berhenti mengalami pergerakan yang dinamis. Dimana pada masa kepemimpinannya angka kelahiran terus mengalami penurunan tanpa kenaikan sama sekali. Kebijakan Presiden Moon Jae In bahkan menjadi kebijakan yang cakupannya cukup luas jika dibandingkan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya yang lebih fokus terhadap ekonomi dan promosi budaya berkeluarga. Namun upaya yang dilakukan pemerintahan presiden Moon Jae In masih belum membuahkan hasil. Terbukti dengan data yang menunjukkan rata-rata angka kelahiran pada awal pemerintahannya berada pada 1,05 menjadi 0,78 anak per wanita di akhir masa jabatannya pada tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan pemerintah era presiden Moon Jae In pada tahun 2017-2022 dalam mengatasi fenomena penurunan angka kelahiran. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan narasumber berkewarganegaraan Korea Selatan. Data ini akan memberikan wawasan terkait pengalaman dan pandangan individu terkait kebijakan yang diterapkan. Pada penelitian ini data sekunder akan diperoleh dari analisis dokumen, laporan pemerintah, artikel jurnal, publikasi ilmiah, serta sumber media lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Konstruktivisme

Penelitian ini menganalisis kegagalan kebijakan era presiden Moon Jae In terhadap fenomena penurunan angka kelahiran melalui kerangka teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme sendiri melihat hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material tetapi juga oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama). Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya seperti struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya (Pramono and Purwono, 2010).

Lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan teori konstruktivisme menurut Ted Hopf. Dimana teorinya menekankan pentingnya struktur sosial dalam hubungan sosial baik di tingkat domestik maupun internasional. Hopf berpendapat bahwa struktur sosial terdiri dari identitas, norma, nilai, dan diskursus, yang menciptakan suatu pola atau keteraturan dalam interaksi masyarakat meskipun terdapat perbedaan pada masing-masing individu. Menurut Hopf, identitas menjadi elemen kunci karena ia menentukan bagaimana aktor melihat diri mereka sendiri serta pihak lain, yang pada akhirnya mempengaruhi preferensi dan tindakan mereka. Preferensi dan tindakan ini nantinya turut mempengaruhi bagaimana posisi aktor di ranah internasional (Hopf, 2002). Teori ini relevan untuk menganalisis fenomena sosial, termasuk kebijakan domestik, karena membantu menjelaskan bagaimana realitas sosial yang dibangun secara kolektif dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam teori konstruktivisme mengenai struktur sosial yang dijelaskan Ted Hopf, terdapat beberapa indikator sebagai berikut (Hopf, 1998, 2002).

- a. Identitas
Identitas merupakan panduan bagaimana aktor melihat diri mereka sendiri dan aktor lain. Keberadaan identitas juga mempengaruhi pilihan serta tindakan aktor dalam situasi tertentu.
- b. Norma
Norma merupakan aturan sosial tidak tertulis yang membentuk cara aktor bertindak. Norma menjadi panduan aktor untuk berperilaku yang dianggap “benar” atau “tepat”.
- c. Nilai
Nilai mencerminkan prinsip-prinsip atau standar yang dianggap penting oleh sebuah komunitas atau kelompok sosial tertentu. Nilai berperan sebagai panduan perilaku yang membantu membentuk norma sosial dan mengarahkan tindakan individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

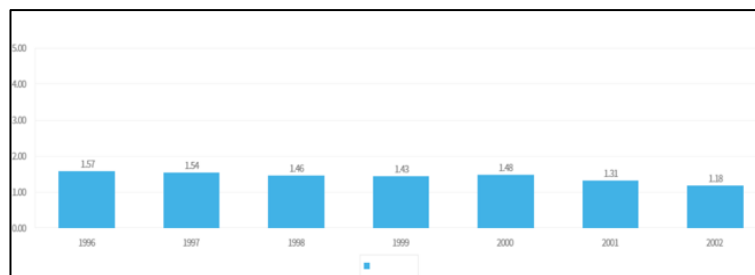
d. Diskursus

Diskursus merupakan praktik komunikasi sosial yang mencakup cara berbicara, berpikir, dan berperilaku yang mendominasi masyarakat tertentu.

Penelitian ini menganalisis kegagalan kebijakan Presiden Moon Jae-in dalam mengatasi penurunan angka kelahiran di Korea Selatan dengan menggunakan teori konstruktivisme Ted Hopf. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, angka kelahiran terus menurun akibat tekanan peran sosial, ketidakpastian ekonomi, nilai individualisme, dan perubahan identitas generasi muda. Melalui indikator norma, nilai, identitas, dan diskursus, penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan negara dan dinamika sosial masyarakat menjadi faktor utama. Ketimpangan ini juga berdampak pada posisi Korea Selatan dalam konteks internasional sebagai negara dengan krisis demografis yang memburuk.

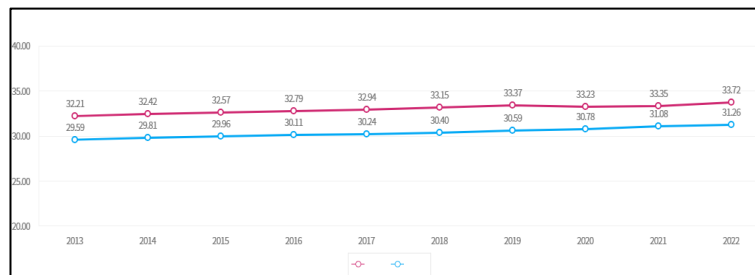
PEMBAHASAN

Pada tahun 1990-an, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat. Namun, pada periode yang sama terjadi penurunan tajam angka kelahiran di Korea Selatan (Lee and Botto, 2021). Pada beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa fenomena penurunan angka kelahiran ini dimulai sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Peristiwa ini seakan memberi efek meluas pada tren individu terkait keputusan menunda pernikahan dan memiliki anak (Cho, 2021).



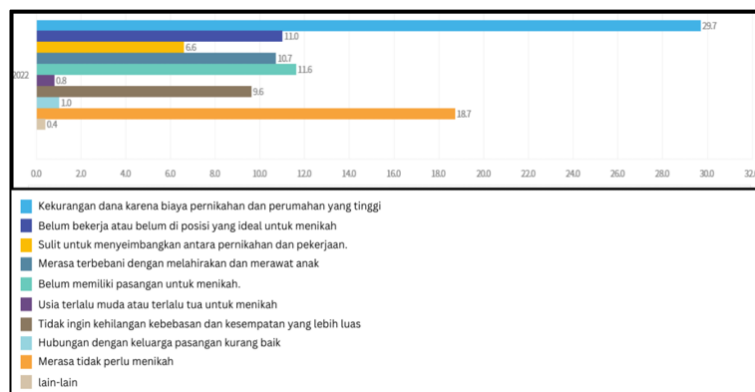
Gambar 3. Angka Kelahiran Korea Selatan Pada Tahun 1996 – 2002
(Sumber: Index Korean, 2024a)

Di awal tahun 2000-an, mulai timbul kekhawatiran sosial terkait transisi demografis yang disebabkan oleh fenomena rendahnya angka kelahiran berkepanjangan. Setiap tahunnya Korea Selatan terus menerus memecahkan rekornya sendiri (Woo, 2020). Korea Selatan semakin menjauh dari angka yang seharusnya dipertahankan agar populasinya tetap dalam status stabil yaitu 2,1 anak per wanita setiap tahunnya. Di Korea Selatan, penyebab terbesar fenomena rendahnya angka kelahiran ini adalah penundaan pernikahan pada generasi muda. Ini terjadi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Yoon, 2024).



Gambar 4. Rata-rata Usia Penduduk Pada Pernikahan Pertama
(Sumber: Index Korean, 2024d)

Data menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk pada pernikahan pertama mereka terus meningkat setiap tahunnya, baik perempuan (biru) maupun laki-laki (merah). Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal ini adalah perubahan nilai-nilai pada generasi muda. Bahkan fenomena ini menciptakan julukan bagi generasi muda yaitu N-po Generation atau N give up Generation. N-po generation adalah nama untuk generasi muda yang menyerah akan beberapa hal karena keadaan yang mereka alami. Awalnya disebut 3-po, yaitu menyerah akan berpacaran, pernikahan, dan memiliki anak. 3-po kemudian berkembang menjadi n-po karena lebih banyak lagi hal yang mereka relakan (Lally, 2022).



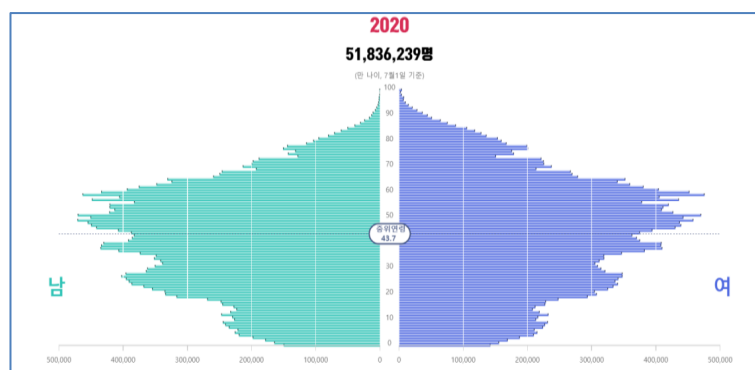
Gambar 5. Survei Sosial: Alasan Individu Memilih Menunda atau Tidak Menikah
(Sumber: Index Korean, 2024b)

Hasil survei Badan Pusat Statistik Nasional Korea Selatan menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk menunda atau tidak menikah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perubahan nilai sosial, dan tekanan budaya. Alasan utama adalah tingginya biaya pernikahan dan perumahan, yang pada 2022 mencapai 287 juta won (sekitar Rp3,2 miliar), menjadikan pernikahan sebagai beban finansial besar. Rumah layak pun dianggap sebagai syarat tidak tertulis untuk menikah, namun tidak terjangkau, terutama di kota besar dengan biaya hidup tinggi. Banyak generasi muda memilih menetap di kota untuk mengejar karier, tetapi dihadapkan pada harga properti yang mahal. Alasan kedua terbesar adalah persepsi bahwa pernikahan tidak perlu, dan ketiga adalah belum memiliki pasangan. Selain itu, alasan lain mencakup kesulitan menyeimbangkan karier dan keluarga, belum bekerja atau belum di posisi ideal, beban melahirkan dan merawat anak, serta kekhawatiran kehilangan kebebasan. Sebagian juga merasa hubungan dengan keluarga pasangan bisa menjadi masalah, atau menganggap usia mereka belum cukup/tidak lagi pantas untuk menikah. Temuan ini mencerminkan pergeseran nilai di masyarakat Korea Selatan, di mana pernikahan semakin dilihat sebagai pilihan pribadi, bukan

kewajiban sosial.

Faktor lain, seperti sulitnya mengimbangi pekerjaan dan kehidupan keluarga serta beban terkait melahirkan dan merawat anak, menunjukkan bagaimana ekspektasi tradisional terhadap peran gender masih menjadi penghalang utama bagi banyak individu, terutama perempuan, untuk memilih menikah. Korea Selatan merupakan negara yang menerapkan norma-norma konfusianisme dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, walaupun sudah banyak berubah mengikuti zaman. Ini termasuk ekspektasi terhadap setiap individu. Namun, modernisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan memberi ruang pada kesadaran akan kesetaraan gender. Membuat masyarakat terlebih generasi muda sadar akan kesempatan mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Begitu juga kesempatan mereka yang luas dalam dunia pendidikan dan karir. Sulitnya mengimbangi kesempatan berkarir dan ekspektasi dalam berkeluarga ditambah lagi masalah ekonomi yang dihadapi generasi muda kemudian memberi dampak langsung pada penundaan pernikahan (Donghun, 2023).

Pada akhirnya tekanan ekonomi dan budaya tradisional kemudian merubah nilai dan norma sosial pada masyarakat Korea Selatan terutama masyarakat di usia produktif. Perubahan yang terjadi cenderung mendukung individualisme yang membuat masyarakat lebih fokus pada pencapaian pribadi. Ini termasuk mengejar kesempatan pendidikan dan karir (Mahmoudi, 2017). Struktur demografi Korea Selatan terdampak oleh adanya fenomena penurunan angka kelahiran. Ini terlihat dari adanya peningkatan pada populasi lanjut usia atau aging population. Ketika angka kelahiran terus menurun, jumlah generasi muda yang masuk ke dalam angkatan kerja semakin sedikit, sementara harapan hidup meningkat. Akibatnya, proporsi penduduk berusia lanjut menjadi lebih besar dibandingkan dengan populasi usia produktif (Mahmoudi, 2017).



Gambar 6. Piramida Proporsi Usia Penduduk
(Sumber: KOSIS, 2023)

Grafik menunjukkan proporsi penduduk perempuan (biru) dan laki laki (hijau) dengan rata-rata usia 43,7 tahun. Sebagian besar penduduk berusia 45 tahun keatas. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar pada penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin berkurang. Populasi yang menua juga berkontribusi pada beban finansial yang lebih besar bagi pemerintah karena meningkatnya biaya pensiun dan perawatan bagi lansia, serta berkurangnya kontribusi ekonomi dari kelompok usia produktif (Cho, 2021).

Korea Selatan juga dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan kekuatan militernya akibat penurunan angka kelahiran yang signifikan (Bae, 2023). Pada tahun 2013 penduduk usia 10 - 19 tahun berjumlah 6.176 kemudian di tahun 2020 turun hingga 4.769 (Yoon, 2024). Ini artinya jumlah calon prajurit yang dapat direkrut ke dalam militer juga berkurang, sementara kebutuhan pertahanan tetap tinggi mengingat situasi geopolitik di Semenanjung Korea.

Penurunan angka kelahiran yang tajam di Korea Selatan juga menyebabkan banyak sekolah terpaksa ditutup karena kekurangan murid. Dengan tingkat kelahiran terendah di dunia, jumlah anak yang memasuki sistem pendidikan terus menurun, sekolah-sekolah terutama yang berada diluar wilayah Seoul terpaksa ditutup. Sejak tahun 2010 - 2021 sebanyak 534 sekolah ditutup dengan sebagian besar lokasi sekolah berada di Jeollanamdo atau provinsi Jeolla Selatan, wilayah yang jauh dari ibu kota (Ji-Ye, 2024).

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam Mengatasi Fenomena Penurunan Angka Kelahiran

Fenomena penurunan angka kelahiran yang telah terjadi selama beberapa dekade memicu permasalahan pada bidang sosial dan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Korea Selatan menyadari urgensi untuk menangani masalah ini melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Untuk merespons fenomena ini, pemerintah Korea Selatan telah mengambil tindakan dengan mengimplementasikan serangkaian kebijakan sejak tahun 2005. Dimana awal dari langkah pemerintah dimulai dengan pembentukan komite dan undang-undang tentang tingkat kelahiran rendah dan penuaan dibentuk. Pemerintah kemudian memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam basic plan for low birth rate and aging society yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2006.

Pemerintahan presiden Roh Moo Hyun meluncurkan *Basic Plan for Low Fertility and Aging Society* pada tahun 2006. Kebijakan yang diberlakukan menargetkan keluarga berpenghasilan rendah dan fokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung pengasuhan anak. Bentuk kebijakan yang diberlakukan pemerintah Korea Selatan saat itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pernikahan, kelahiran, dan pengasuhan anak. hal ini dicapai dengan memberikan dukungan finansial bagi pasangan muda yang baru menikah. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga melakukan pengembangan infrastruktur pengasuhan anak dengan membuka pusat-pusat pengasuhan anak dan peningkatan kualitas layanan yang ada (Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy, 2006).

Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dengan menyediakan subsidi untuk biaya pengasuhan anak dan dukungan keuangan untuk pendidikan anak. pemerintah juga berupaya mengurangi beban ekonomi keluarga terkait biaya perumahan dengan memberi dukungan pada keluarga muda hingga mampu mendapatkan perumahan.

Dalam mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga pada masyarakat, pemerintah mensosialisasikan dan memperluas opsi kerja fleksibel. Dimana hal ini mencakup jam kerja yang dapat disesuaikan dan hak untuk meminta pengurangan jam kerja untuk tujuan pengasuhan anak. Pemerintah juga memperkuat hak-hak pekerja untuk mendapatkan cuti melahirkan dan pengasuhan anak, termasuk tunjangan selama cuti tersebut. Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pemerintah memperkuat layanan kesehatan bagi ibu dan

anak yang mencakup dukungan untuk pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan, serta program nutrisi yang memastikan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga setelah kelahiran (Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy, 2006).

Kebijakan pada pemerintahan presiden Roh Moo Hyun berhasil merubah persepsi mengenai fenomena penurunan angka kelahiran yang awalnya dianggap sebagai problem pribadi dan keluarga menjadi problem nasional yang membutuhkan intervensi negara. Ini terlihat dari penyediaan layanan pengasuhan yang didukung oleh negara.

Kebijakan yang diberlakukan juga tidak luput dari keterbatasan. Kebijakan terlalu fokus pada dukungan mikro seperti subsidi biaya pengasuhan anak, sementara masalah struktural seperti stabilitas pekerjaan dan akses perumahan bagi kaum muda kurang ditangani secara memadai. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya peningkatan yang signifikan pada angka kelahiran (Lee and Choi, 2015).

Basic plan ke-2 yang dibentuk oleh pemerintahan presiden Lee Myung Bak mulai diterapkan untuk memperbaiki basic plan sebelumnya. Basic plan ke-2 ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang dapat mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga (Better Future, 2018)

Walaupun kebijakan yang diterapkan kurang lebih sama dengan Basic plan pertama, namun basic plan ke-2 ini memperluas cakupan target dengan menyebut penerapan kebijakan pada *working families*, tidak hanya keluarga berpenghasilan rendah. Kemudian dengan tujuan menciptakan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan keluarga, kebijakan pemerintah presiden Lee Myung Bak berupaya memperbaiki sistem cuti orang tua dan memperluas partisipasi perusahaan dalam menciptakan lingkungan tempat kerja yang ramah keluarga. Selain itu pemerintahan presiden Lee Myung Bak berupaya mengurangi beban keuangan dari pernikahan dan membesarkan anak. Juga meningkatkan kualitas layanan penitipan anak dengan memastikan kesempatan yang adil dan mendukung pengembangan kapasitas anak (Better Future, 2018). Namun kebijakan ini tidak menjawab penundaan pernikahan yang disebabkan oleh banyaknya pertimbangan pada generasi muda sebelum memutuskan untuk menikah.

Basic Plan ke-2 melanjutkan upaya dari Basic plan 1 dengan fokus pada memperluas dan memperdalam dukungan untuk keluarga dan anak-anak. Kebijakan ini berhasil memperkuat sistem dukungan sosial bagi keluarga di Korea Selatan melalui peningkatan dalam kebijakan *work-life balance* seperti cuti melahirkan dan sistem pengasuhan anak yang lebih fleksibel. Namun basic plan ke-2 tidak mampu secara efektif mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan penurunan angka kelahiran, seperti ketidakstabilan pekerjaan dan tingginya biaya pendidikan (Lee and Choi, 2015).

Pemerintah presiden Park Geun Hye menerapkan basic plan ke-3. Pemerintahan presiden Park Geun Hye berupaya untuk meratakan penerapan kebijakan dengan memberi bantuan lebih pada keluarga berpenghasilan rendah dan wilayah pedesaan yang sulit mendapatkan layanan perawatan anak.

Kebijakan yang diterapkan pemerintahan presiden Park Geun Hye mencakup lebih banyak upaya untuk menangani keterlambatan pernikahan dan penolakan untuk menikah karena alasan sosial-ekonomi (Better Future, 2018). Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan, pemerintah memberikan subsidi perumahan bagi pasangan muda dan memberikan bantuan keuangan untuk meringankan biaya pernikahan serta pendidikan anak. Dukungan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama dalam penundaan pernikahan

dan kelahiran (Better Future, 2018). Namun pada kenyataannya generasi muda masih banyak yang menunda pernikahan. Ditambah lagi, dari awal masa pemerintahan presiden Park Geun Hye hingga akhir pemerintahannya harga perumahan meningkat sebesar 6% (Index Korean, 2024c).

Pemerintahan presiden Park Geun Hye juga memperkenalkan kebijakan untuk mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga melalui perpanjangan cuti melahirkan, meningkatkan akses ke fasilitas pengasuhan anak, serta mendorong partisipasi pria dalam pengasuhan anak. Kebijakan ini juga berupaya mendukung pekerja perempuan agar tidak perlu memilih antara karir dan keluarga. Namun beban ekonomi yang begitu besar tetap merubah nilai-nilai pada generasi muda khususnya perempuan sehingga tetap mementingkan karir daripada berkeluarga.

Pemerintah juga melakukan kampanye publik dan program pendidikan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai pernikahan, keluarga, dan reproduksi. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pernikahan dan memiliki anak dalam mendukung keberlanjutan sosial. Kemudian terdapat kebijakan Pemberdayaan Perempuan dimana kebijakan ini fokus pada meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dengan tetap menjaga *work-life balance*. Upaya ini termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung wanita dalam karier mereka sambil tetap dapat mengurus anak.

Basic Plan 3 (2016-2020) berusaha untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terhadap masalah penurunan angka kelahiran di Korea Selatan. Namun basic plan 3 tetap dihadapkan pada beberapa tantangan norma sosial dan budaya yang sudah mengakar pada masyarakat Korea Selatan, ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan kebijakan yang diberlakukan tidak berjalan secara optimal dan tidak mampu memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan angka kelahiran (Lee and Choi, 2015).

Kebijakan Moon Jae In dalam Mengatasi Fenomena Penurunan Angka Kelahiran

Angka kelahiran di Korea Selatan mengalami penurunan yang signifikan. Pada awal masa pemerintahan presiden Moon tepatnya pada tahun 2017, angka kelahiran mencapai 1,05 anak per wanita. Kemudian dua tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2019, angka kelahiran berada pada 0,91 anak per wanita. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai satu satunya negara di dunia dengan tingkat kelahiran dibawah satu anak per wanita (Index Korean, 2024c).

Dengan tingkat kelahiran yang terus menurun hingga mencapai yang terendah di dunia, pemerintahan presiden Moon berupaya menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dimana hal ini dipercaya akan meningkatkan angka kelahiran. Pemerintah merilis basic plan ke-4. Dimana salah satu kebijakan yang diambil adalah menciptakan keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (*work-life balance*) yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Korea Selatan menyadari bahwa tekanan kerja yang tinggi dan kurangnya dukungan terhadap keluarga muda telah menjadi penghalang signifikan bagi pasangan dalam mengambil keputusan untuk memiliki anak. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong fleksibilitas kerja, seperti cuti orang tua yang lebih panjang dan pengurangan jam kerja, diimplementasikan untuk memungkinkan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, dapat berpartisipasi aktif dalam pengasuhan anak tanpa harus mengorbankan karir mereka (Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy, 2020).

Pemerintahan Presiden Moon Jae-in menekankan pentingnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta memperkuat peran negara dalam penyediaan layanan pengasuhan anak yang berkualitas dan terjangkau. Pemerintah membangun dan meningkatkan jumlah pusat pengasuhan anak, disertai dengan perlindungan hak anak untuk memastikan akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Salah satu terobosan signifikan adalah inklusivitas kebijakan bagi semua jenis keluarga, baik tradisional maupun non-tradisional seperti orang tua tunggal atau pasangan tidak menikah. Dukungan yang diberikan mencakup subsidi, insentif kelahiran, dan perumahan terjangkau. Selain itu, kebijakan Moon menekankan kesetaraan gender dalam dunia kerja, memastikan perempuan dapat mengembangkan karier setelah melahirkan tanpa harus memilih antara keluarga dan pekerjaan. Berbeda dari tiga presiden sebelumnya yang fokus pada peningkatan angka kelahiran secara langsung dan integrasi kebijakan keluarga dengan pertumbuhan ekonomi, Moon lebih menekankan pada perubahan norma sosial dan peningkatan kualitas hidup. Dibandingkan dengan era Park Geun-hye yang hanya menambah layanan pengasuhan, Moon mengedepankan pendekatan struktural yang lebih luas, termasuk penghapusan stigma terhadap keluarga non-tradisional dan promosi kesetaraan gender menyeluruh.

Analisis Kegagalan Pemerintahan Moon Jae In Dalam Mengatasi Penurunan Angka Kelahiran

Penurunan angka kelahiran di Korea Selatan telah menjadi salah satu tantangan demografis terbesar yang dihadapi negara tersebut. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Sebagai respons, pemerintahan Moon Jae-in meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong angka kelahiran, seperti pemberian subsidi keuangan bagi keluarga dan insentif bagi pasangan yang memiliki anak, termasuk pasangan non-tradisional. Meskipun kebijakan ini menunjukkan niat untuk mengakomodasi perubahan dalam struktur keluarga modern, tingkat kelahiran tetap menunjukkan penurunan yang signifikan. Kegagalan ini tidak hanya mencerminkan tantangan teknis dalam implementasi kebijakan, tetapi juga ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dengan struktur sosial masyarakat Korea Selatan.

Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme (Hopf, 2002), penelitian ini akan menganalisis kegagalan kebijakan tersebut melalui empat indikator: norma, nilai, identitas, dan diskursus. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang mendasari masyarakat Korea Selatan memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, serta untuk memahami akar dari ketidaksesuaian kebijakan yang dirancang untuk mengatasi krisis demografi ini.

Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya, penyebab terbesar fenomena penurunan angka kelahiran di Korea Selatan adalah penundaan pernikahan. Sebagian besar kelahiran di Korea Selatan terjadi setelah adanya pernikahan, maka dari itu dengan adanya penundaan pernikahan angka kelahiran juga ikut menurun. Analisis menggunakan teori konstruktivisme digunakan agar dapat membantu mengungkap apa sebenarnya yang menjadi alasan penundaan pernikahan tersebut, sehingga membuat kebijakan pemerintah Moon Jae in tidak efektif mengatasi fenomena tersebut.

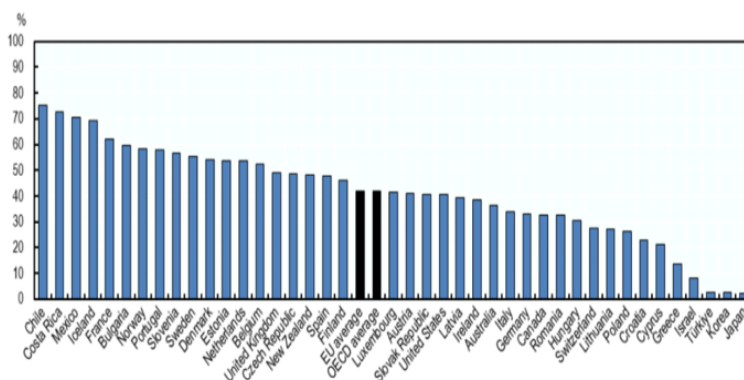
Norma Terkait Pernikahan dan Keluarga

Norma merupakan aturan tidak tertulis atau ekspektasi sosial yang mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat (Hopf, 2002). Di Korea Selatan alasan terbesar generasi muda memilih untuk menunda atau tidak menikah adalah tingginya biaya pernikahan dan perumahan. Dari sini dapat disimpulkan norma yang masih berlaku adalah dimana sebagian besar generasi muda menganggap bahwa pelaksanaan pernikahan penting untuk dilakukan serta kepemilikan akan tempat tinggal yang layak adalah syarat penting untuk menikah.

Terdapat norma yang mengatur tentang pernikahan dan keluarga di Korea Selatan, dimana norma atau aturan ini banyak dipengaruhi oleh konfusianisme yang dimanifestasikan dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk pentingnya pernikahan, garis keturunan keluarga serta pembagian peran gender dalam keluarga (Raymo *et al.*, 2015).

Pernikahan dianggap sebagai salah satu proses penting karena menandai dimulainya sistem keluarga (Raymo *et al.*, 2015). Selain itu Norma yang berasal dari ajaran Konfusianisme telah menjadi dasar budaya pernikahan di Korea Selatan, di mana pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial dan bentuk bakti anak terhadap orang tua (*filial piety*). Pernikahan juga dianggap sebagai hal penting yang menandakan penyatuan dua keluarga, bukan hanya dua individu (Bedford and Yeh, 2019). Dalam tradisi konfusianisme individu tidak lebih dari pembawa keturunan yang kemudian anak atau keturunan tersebut nantinya harus berbakti pada orang tua atau kakek nenek (Raymo *et al.*, 2015). Sejalan dengan ini, pembagian peran masing-masing gender juga dibahas dalam tradisi ini. Laki-laki merupakan kepala keluarga yang wajib bertanggung jawab penuh untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, sedangkan perempuan sebagai seorang istri dan ibu bertanggung jawab mengurus keluarga serta memastikan keberlanjutan garis keturunan (Manek, 2023).

Pentingnya pernikahan dan peran masing-masing gender dalam keluarga kemudian menimbulkan stigma negatif terhadap kelahiran diluar pernikahan. Kelahiran diluar pernikahan dianggap menunjukkan kegagalan seorang individu membangun keluarganya, bahkan akan sangat merugikan bagi seorang perempuan yang melahirkan tanpa pernikahan karena dianggap memperburuk martabat keluarga (Kim, Mosler and Kalinowski, 2022).



Gambar 11. OECD: Kelahiran Saat Status Ibu Selain Daripada Menikah di Tahun 2020

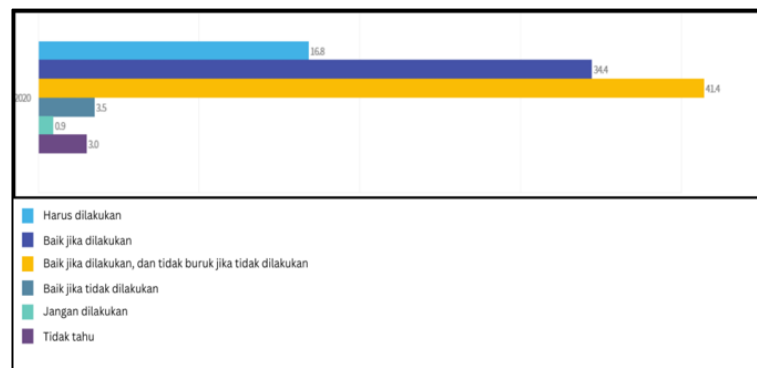
(Sumber: OECD, 2021)

Data diatas merupakan proporsi kelahiran saat status ibu selain daripada menikah menurut OECD. Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kelahiran diluar pernikahan

terendah yaitu hanya sekitar 2-3% sedangkan rata-rata negara OECD adalah 42% (OECD, 2021).

Norma tradisional memandang bahwa seseorang sebaiknya menikah di usia tertentu, melahirkan anak, dan mengikuti pembagian peran gender: pria sebagai pencari nafkah dan wanita sebagai pengurus keluarga. Norma ini menimbulkan tekanan sosial yang besar, terutama bagi perempuan, yang diharapkan untuk berhenti bekerja atau mengurangi ambisi karir setelah menikah dan memiliki anak.

Seiring perkembangan zaman, norma-norma tradisional mulai sedikit mengalami perubahan berkat munculnya budaya budaya baru yang masuk di Korea Selatan. Terkhusus budaya budaya barat yang lebih fleksibel dibanding norma tradisional di Korea Selatan. Namun, norma-norma tradisional yang sudah ada sejak dahulu sulit untuk benar-benar menghilang dari kehidupan masyarakat meskipun sudah terpapar modernisasi.



Gambar 12. Survei Sosial: Pandangan Masyarakat Korea Selatan Terkait Pernikahan
(Sumber: Index Korean, 2024a)

Survei Badan Statistik Korea Selatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan baik jika dilakukan, tetapi tidak buruk jika tidak dilakukan (kuning). Hanya sebagian kecil yang melihat pernikahan sebagai kewajiban (biru muda). Hal ini mencerminkan perubahan norma sosial, di mana generasi muda tidak lagi melihat pernikahan sebagai keharusan mutlak, meski tidak sepenuhnya menolaknya. Modernisasi turut mendorong pergeseran ini. Banyak perempuan menunda pernikahan demi pendidikan dan karier, karena sulit menyeimbangkan pekerjaan dengan ekspektasi keluarga tradisional. Akibatnya, angka kelahiran ikut menurun karena mayoritas anak di Korea Selatan lahir dalam pernikahan.

Nilai Hidup Generasi Muda Terkait Pernikahan dan Keluarga

Nilai adalah prinsip atau keyakinan mendalam yang menentukan apa yang dianggap penting, baik dan benar dalam masyarakat tertentu (Hopf, 2002). Nilai lebih bersifat abstrak dan internal dibandingkan norma. Jika norma mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu, nilai memberikan alasan mengapa tindakan tersebut penting.

Dalam konteks masyarakat Korea Selatan, nilai-nilai tradisional yang berakar pada Konfusianisme terus memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Yang mana nilai-nilai tradisional ini menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Nilai ini menekankan pentingnya pengorbanan individu demi kepentingan kolektif keluarga dan melanjutkan garis keturunan (Bedford and Yeh, 2019). Namun, generasi muda Korea Selatan mulai mempertanyakan relevansi nilai-nilai ini di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang

pesat. nilai-nilai modern berkembang di kalangan generasi muda, yang lebih mengutamakan kebebasan individu, kesetaraan gender, dan pencapaian pribadi (An, Lee and Woo, 2022).

Narasumber dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ia merasa "keadaannya sekarang belum ideal untuk menikah," karena ia ingin memastikan kestabilan karier dan finansial terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari prioritas keluarga ke prioritas individu. Namun, tekanan nilai tradisional tetap sulit diabaikan. menciptakan konflik internal yang menyebabkan penundaan pernikahan dan turut menurunkan angka kelahiran di Korea Selatan.

Identitas Modern Generasi Muda dan Dilema Pernikahan

Identitas generasi muda Korea Selatan saat ini mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai modern yang mengutamakan kebebasan individu dan aspirasi pribadi, serta norma tradisional yang masih kuat dalam masyarakat. Banyak generasi muda mengadopsi identitas modern yang tidak lagi menganggap pernikahan sebagai tujuan utama dalam hidup. Mereka lebih fokus pada pencapaian karier, pengembangan diri, atau mengejar kebebasan pribadi (An, Lee and Woo, 2022). Identitas ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai di masyarakat Korea Selatan, di mana pernikahan tidak lagi menjadi keharusan untuk meraih status sosial atau pengakuan. Namun, meskipun identitas modern ini dominan dalam kehidupan mereka, generasi muda sering kali merasa sulit untuk mengabaikan pendapat keluarga terkait pernikahan (An, Lee and Woo, 2022).

Hal ini karena identitas mereka sebagai anak atau anggota keluarga yang "baik" tetap menjadi bagian penting dalam cara mereka memandang diri sendiri (Raymo *et al.*, 2015). Tekanan untuk memenuhi harapan keluarga, seperti mengadakan upacara pernikahan atau memiliki rumah sebelum menikah, menjadi dilema yang kompleks. Sebagai contoh, narasumber dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pernikahan bukan kewajiban baginya dan pasangannya, namun ia merasa sulit mengabaikan pendapat keluarga. Hal ini menggambarkan dualitas identitas. Di satu sisi, ia memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, di sisi lain ia merasa terikat pada ekspektasi sosial yang diwariskan.

Dilema ini menunjukkan bahwa meskipun identitas modern generasi muda cenderung mendefinisikan ulang makna pernikahan, hubungan mereka dengan keluarga dan nilai-nilai tradisional tetap memengaruhi keputusan hidup mereka. Ini menjadi salah satu alasan mengapa penundaan pernikahan semakin umum terjadi, meskipun masyarakat secara keseluruhan mulai menerima perubahan nilai. Identitas modern ini, dengan segala kompleksitasnya, menunjukkan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menjalani kehidupan di tengah pergeseran sosial.

Pergeseran Narasi Sosial tentang Pernikahan dan Keluarga

Diskursus mengenai pernikahan dan keluarga di Korea Selatan mencerminkan berbagai pandangan yang berkembang seiring perubahan sosial. Dalam konteks narasi terkait keluarga dan pernikahan, hal ini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti Konfusianisme, ekspektasi sosial, hingga pandangan modern tentang kebebasan individu (Raymo and Park, 2020). Di Korea Selatan, diskursus tentang pernikahan dan keluarga sedang mengalami transformasi signifikan. Norma tradisional yang berakar pada nilai-nilai Konfusianisme terus dipertanyakan oleh diskursus modern yang lebih individualistik. Di Korea Selatan pernikahan dianggap sebagai prasyarat untuk membangun keluarga. Pandangan ini didukung oleh nilai-nilai

Konfusianisme, yang menekankan kehormatan keluarga, harmoni sosial, dan tanggung jawab dalam hubungan antarindividu (Raymo *et al.*, 2015). Dalam diskursus ini, menikah sebelum memiliki anak adalah hal yang “benar” secara moral dan sosial (Kim, Mosler and Kalinowski, 2022). Namun, perubahan sosial yang terjadi dengan cepat mulai memunculkan narasi baru yang menantang pandangan ini. Generasi muda, yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, semakin mempertanyakan keharusan menikah, terutama dalam konteks peran tradisional yang masih kuat.

Fenomena pergeseran narasi sosial terkait pernikahan dan keluarga secara nyata terlihat jelas dalam kasus-kasus publik, yang dialami beberapa *public figure*. Contohnya seperti Kim Jong Dae (Chen) yang merupakan seorang anggota grup musik. Ia mengumumkan akan kehamilan pasangannya dan akan melaksanakan pernikahan. Kabar ini memunculkan reaksi yang beragam. Dalam diskursus tradisional, langkah ini dianggap sebagai pelanggaran norma sosial. Sebagian penggemar Korea mengkritik karena dianggap memberi contoh buruk, dimana sebagai tokoh publik ia seharusnya mencerminkan moralitas tinggi. Namun, tidak sedikit juga yang mendukung dan memberi ucapan selamat (BBC, 2020). Ini mencerminkan munculnya diskursus modern yang menerima kehamilan di luar pernikahan sebagai pilihan pribadi yang valid.

Selain itu, untuk meningkatkan angka kelahiran di Korea Selatan pemerintah Moon Jae In memperluas cakupan penerapan kebijakan itu sendiri, dimana kebijakan-kebijakan sebelumnya yang fokus pada keluarga tradisional berubah menjadi dapat diterapkan ke segala bentuk keluarga termasuk keluarga non tradisional (Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy, 2020). Ini sebagai bentuk narasi yang mendukung perubahan pandangan terhadap pernikahan dan keluarga yang masih banyak dipengaruhi norma dan nilai tradisional.

Implikasi Kebijakan Terhadap Struktur Sosial di Korea Selatan

Meskipun penundaan pernikahan telah menjadi penyebab utama menurunnya angka kelahiran sejak era Presiden Roh Moo Hyun, Lee Myung Bak, dan Park Geun Hye, pemerintahan Moon Jae-in menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Pada masa kepemimpinannya, terjadi perubahan sosial signifikan terkait kesadaran gender dan kebebasan individu. Pemerintahan Moon secara aktif mendorong peran perempuan di luar peran domestik, sehingga banyak perempuan memilih fokus pada karier dan aspirasi pribadi. Hal ini memperkuat keputusan untuk menunda atau tidak menikah, berbeda dengan era sebelumnya ketika norma tradisional masih memegang pengaruh kuat.

Kebijakan Moon Jae-in yang inklusif terhadap seluruh bentuk keluarga dan menyediakan bantuan finansial seperti subsidi dan insentif kelahiran merupakan langkah positif. Namun, kebijakan tersebut belum menyentuh akar masalah struktural yang lebih dalam. Norma tradisional masih mengakar kuat di masyarakat Korea Selatan, di mana pernikahan dianggap sebagai prasyarat mutlak untuk memiliki anak. Pandangan bahwa pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga menciptakan tekanan sosial terhadap individu untuk mencapai stabilitas finansial sebelum menikah.

Struktur sosial yang menuntut kesiapan ekonomi seperti memiliki rumah dan pendapatan stabil menjadi hambatan besar bagi generasi muda. Meskipun bantuan finansial disediakan, kebijakan pemerintah tidak mampu menjawab ketidaksesuaian antara realitas sosial dan ekspektasi budaya. Akibatnya, dukungan ekonomi tidak cukup untuk membalikkan tren

penurunan angka kelahiran. Tanpa reformasi nilai dan norma sosial, kebijakan populasi cenderung tidak efektif.

SIMPULAN

Dari analisis yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa meskipun kebijakan tersebut dirancang untuk mendukung berbagai bentuk keluarga, termasuk keluarga non-tradisional, kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sosial dan budaya yang ada di Korea Selatan. Sebagian besar kelahiran di Korea Selatan masih terjadi setelah pernikahan, dan kebijakan yang difokuskan pada keluarga non-tradisional ternyata tidak cukup efektif untuk mendorong peningkatan angka kelahiran.

Penundaan pernikahan, yang menjadi fenomena utama dalam menurunnya angka kelahiran, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, di mana generasi muda menghadapi kesulitan finansial yang berat dan rasa ketidakpastian terhadap masa depan. Selain itu, adanya kesadaran yang semakin berkembang mengenai kesetaraan gender dan kebebasan individu telah mendorong sebagian besar pasangan muda untuk menunda pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali. Meskipun harapan tradisional terhadap setiap keluarga masih ada, modernisasi dan perubahan pandangan sosial semakin memperjelas bahwa pernikahan bukan lagi suatu kewajiban atau norma yang harus dipatuhi. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kebijakan Moon Jae In mencoba memberikan insentif ekonomi melalui bantuan keuangan untuk pasangan yang memiliki anak, kebijakan ini gagal menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat, yakni penundaan pernikahan. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor faktor sosial dan ekonomi ini tidak mampu mengatasi akar masalahnya. Kebijakan yang hanya terfokus pada insentif ekonomi tanpa perubahan mendalam dalam struktur sosial dan budaya, serta tanpa memperhatikan beban ekonomi yang dihadapi oleh pasangan muda, tidak cukup untuk mendorong peningkatan angka kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- An, D., Lee, S.-L. and Woo, H. (2022) 'Marriage Intention among Korean Young Adults: Trends and Influencing Factors', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), p. 8557. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph19148557>.
- Bae, G. (2023) *South Korea's military has a new enemy: Population math*, CNN. Available at: <https://www.cnn.com/2023/12/30/asia/south-korea-birth-rate-military-strength-intl-hnk-ml> (Accessed: 7 July 2025).
- BBC (2020) 'Chen: EXO's Kim Jong-dae confirms he's getting married', *BBC Newsround*, 13 January. Available at: <https://www.bbc.com/newsround/51088746> (Accessed: 7 July 2025).
- Bedford, O. and Yeh, K.-H. (2019) 'The History and the Future of the Psychology of Filial Piety: Chinese Norms to Contextualized Personality Construct', *Frontiers in Psychology*, 10. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00100>.
- Cho, K.A. (2021) 'Korea's low birth rate issue and policy directions', *Korean Journal of Women Health Nursing*, 27(1), pp. 6-9. Available at: <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2021.02.16>.
- Donghun, Y. (2023) 'Analytical Research for Marriage Delay in South Korea', *Post-Print [Preprint]*. Available at: <https://ideas.repec.org/p/hal/journal/hal-04132974.html> (Accessed: 7 July 2025).

- Hopf, T. (1998) 'The Promise of Constructivism in International Relations Theory', *International Security*, 23(1), p. 171. Available at: <https://doi.org/10.2307/2539267>.
- Hopf, T. (2002) *Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press.
- IHME (2024) *The Lancet: Dramatic declines in global fertility rates set to transform global population patterns by 2100*, www.healthdata.org. Available at: <https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-dramatic-declines-global-fertility-rates-set-transform> (Accessed: 7 July 2025).
- Index Korean (2024a) 결혼에 대한 견해, index.go.kr. Available at: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?pop=1&idxCd=5061>.
- Index Korean (2024b) 결혼하지 않는 이유, index.go.kr. Available at: <https://www.index.go.kr/unify/potal/indicator/IndexInfo.do?cdNo=260&clasCd=12&idxCd=H0014&upCd=6>.
- Index Korean (2024c) 저출생 통계지표, 지표누리. Available at: <https://www.index.go.kr/unify/potal/indicator/IndexInfo.do?classCd=%2012&idxCd=H0007&upCd=3> (Accessed: 7 July 2025).
- Index Korean (2024d) 초혼연령, index.go.kr. Available at: <https://www.index.go.kr/unify/potal/indicator/IndexInfo.do?clasCd=10&idxCd=F0023#>.
- Jeong-won, S. (2023) "초등학교 폐교 이제 놀랍지도 않네"...입학생 수 역대최저라는데, 매일경제. Available at: <https://www.mk.co.kr/news/society/10889676> (Accessed: 7 July 2025).
- Ji-Ye, K. (2024) *Historic elementary schools face closure as enrollments nosedive*, *Kore JoongAng Daily*. Available at: <https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2024-03-05/national/socialAffairs/Historic-elementary-schools-face-closure-as-enrollments-nosedive/1995073> (Accessed: 7 July 2025).
- Jun, K.H. (2005) 'The transition to sub-replacement fertility in South Korea: Implications and prospects for population policy', *The Japanese Journal of Population*, 3(1), pp. 26-57.
- Kim, N., Mosler, H. and Kalinowski, T. (2022) *South Korea Report. Sustainable Governance Indicators 2022*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Available at: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/doi/10.11586/2022117> (Accessed: 7 July 2025).
- KOSIS (2023) 인구피라미드|Pyramida Penduduk, kosis.kr. Available at: <https://kosis.kr/visual/populationKorea/PopulationPyramidDetail.do?year=2023> (Accessed: 7 July 2025).
- Lally, K. (2022) 'The N-Po Generation: The Struggle with Housing Insecurity in Seoul for the "Numerous Giving Up Generation"', *Wittenberg University East Asian Studies Journal*, 45, pp. 23-37.
- Lee, C.M. and Botto, K. (2021) *Demographics and the Future of South Korea*, *Carnegie Endowment for International Peace*. Available at: <https://carnegieendowment.org/posts/2021/06/demographics-and-the-future-of-south-korea?lang=en> (Accessed: 7 July 2025).
- Lee, S. and Choi, H. (2015) 'Lowest-Low Fertility and Policy Responses in South Korea', in *Low and Lower Fertility*. Cham: Springer International Publishing, pp. 107-123. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-21482-5_6.
- Mahmoudi, K.M. (2017) 'Rapid Decline of Fertility Rate in South Korea: Causes and Consequences', *Open Journal of Social Sciences*, 05(07), pp. 42-55. Available at: <https://doi.org/10.4236/jss.2017.57004>.

- Manek, B.G.A. (2023) 'Confucian Historical Narratives and Misogynic Culture in South Korea', *Journal of Asian Social Science Research*, 5(1), pp. 49-62. Available at: <https://doi.org/10.15575/jassr.v5i1.73>.
- Maynard, M. (2022) *The Long-Term Decline in Fertility—and What It Means for State Budgets*, Pew. Available at: <https://pew.org/3VfmME1> (Accessed: 7 July 2025).
- OECD (2021) *Share of births outside of marriage*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Available at: https://webfs.oecd.org/els-com/Family_Database/SF_2_4_Share_births_outside_marriage.pdf.
- OECD (2023) *Fertility Rates*, OECD. Available at: <https://www.oecd.org/en/data/indicators/fertility-rates.html> (Accessed: 7 July 2025).
- Pramono, S. and Purwono, A. (2010) 'Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik', *Spektrum*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.31942/spektrum.v7i2.485>.
- Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy (2006) '저출산고령사회 기본계획 (보완판) | Plan for Ageing Society and Population | 새로마지플랜 2010'. Korean Government. Available at: https://www.betterfuture.go.kr/web/viewer.html;jsessionid=6289A9D602BAF9AD5A18520503D617C8.node20?magazineMode=true&file=/upload/data/basicPlan/20235/basicPlan_202306070737106872.
- Presidential Committee on Ageing Society and Population Policy (2020) *The 4th Basic Plan for Low Birth Rate and Aging Society, Better Future*. Available at: <https://www.betterfuture.go.kr/> (Accessed: 7 July 2025).
- Raymo, J.M. et al. (2015) 'Marriage and Family in East Asia: Continuity and Change', *Annual Review of Sociology*, 41(1), pp. 471-492. Available at: <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112428>.
- Raymo, J.M. and Park, H. (2020) 'Marriage Decline in Korea: Changing Composition of the Domestic Marriage Market and Growth in International Marriage', *Demography*, 57(1), pp. 171-194. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00844-9>.
- Saragi, A.M.S. and Agustina, B.N.A. (2022) 'Fenomena Glass Ceiling Sebagai Wujud Budaya Patriarki Di Korea Selatan', *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(2), p. 124. Available at: <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i2.30738>.
- Yoon, Y. (2024) *PacNet #3 – South Korea's military: Navigating external and internal challenges*, *Pacific Forum*. Available at: <https://pacforum.org/publications/pacnet-3-south-koreas-military-navigating-external-and-internal-challenges/> (Accessed: 7 July 2025).
- Yun, J. et al. (2022) 'Birth Rate Transition in the Republic of Korea: Trends and Prospects', *Journal of Korean Medical Science*, 37(42). Available at: <https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e304>.